

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Integrasi nasional merupakan suatu konsep yang mengarah pada terciptanya keutuhan bangsa melalui penciptaan konsensus di antara keragaman yang ada. Melalui upaya ini, setiap fenomena kemasyarakatan diharapkan dapat memberikan sumbangan maksimal bagi eksistensi dan kemajuan bangsa. Ide pokok integrasi nasional adalah memaksimalkan persamaan dan meminimalkan perbedaan dalam pendayagunaan potensi, pemenuhan aspirasi, dan penanggulangan setiap masalah kebangsaan. Dengan demikian, integrasi nasional merupakan suatu proses yang perlu terus dibina dan ditingkatkan, terutama karena sifatnya yang dinamis sejalan dengan kondisi kehidupan politik nasional yang juga selalu berkembang.

Berdasarkan pengalaman, dapat diketahui bahwa integrasi nasional dapat diciptakan melalui kesadaran akan pentingnya memelihara eksistensi bangsa dari segala bentuk ancaman, kemampuan sistem politik nasional dalam mengakomodasi aspirasi seluruh masyarakat, dan kemampuan untuk menyelenggarakan politik desentralisasi dalam pemerintahan.

Berkaitan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini, peneliti berpendapat bahwa terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan integrasi nasional. Aspek

pertama, yakni eksistensi bangsa, mempunyai hubungan yang erat dengan ketahanan nasional yang kualitasnya sebagian besar tergantung pada mantap tidaknya perwujudan wawasan nusantara.

Aspek kedua, berkisar di seputar efektivitas lembaga legislatif atau posisi saling melengkapi antara infrastruktur politik dan suprastuktur politik. Dalam hal ini, lembaga perwakilan rakyat dituntut untuk berperan maksimal, baik dalam pelaksanaan fungsi representasi maupun dalam fungsi pembuatan kebijakan dan legitimasi. Selain itu, dipahami bahwa untuk menunjang mantapnya integrasi nasional, maka lembaga perwakilan rakyat hendaknya secara efektif menjangkau seluruh lapisan dan kelompok masyarakat serta mampu menciptakan kompromi atau musyawarah dalam pembuatan kebijakan pemerintahan dan pembangunan.

Aspek ketiga, yakni politik desentralisasi, merupakan penguat integrasi nasional, terutama karena kemauan politik ini merupakan jembatan antara kepentingan nasional dan kebutuhan masyarakat. Pemberian kesempatan pada masyarakat lokal untuk mengatur dan mengurus masalah-masalah tertentu dalam kerangka pemerintahan nasional merupakan salah satu faktor untuk memperbesar kesadaran, kreatifitas, dan kontribusi mereka kepada kepentingan bangsa. Hal inilah cikal bakal terbentuknya *civic governance*.

Berbagai aspek tersebut di atas, secara terpisah atau bersama-sama, memberi pengaruh yang besar terhadap setiap upaya untuk membina persatuan dan kesatuan nasional. Namun, selain ketiga aspek yang telah diuraikan,

sesungguhnya masih terdapat aspek keempat yang dapat memperkokoh integrasi nasional. *Aspek keempat* adalah pelaksanaan pembangunan karakter bangsa.

Seperti diketahui bahwa Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa yang tertuang dalam Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010 – 2025 (Republik Indonesia, 2010 : 1) telah menjadikan pembangunan karakter bangsa sebagai arus utama pembangunan nasional. Hal ini mengandung arti bahwa setiap upaya pembangunan harus selalu diarahkan untuk memberi dampak positif terhadap pembangunan karakter. Oleh karena itu, pembangunan karakter bangsa memiliki cakupan dan tingkat urgensi yang sangat luas dan bersifat multidimensional. Ditegaskan lebih lanjut dalam kebijakan tersebut bahwa : (1) karakter merupakan hal yang sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa; (2) karakter berperan sebagai “kemudi” dan kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing; (3) karakter tidak datang dengan sendirinya tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat.

Berkaitan dengan kebijaksanaan tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa secara garis besar tujuan utama dari pembangunan karakter bangsa adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara baik karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan pengetahuan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu; maupun karakter warga negara, misalnya kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan hukum (*rule of law*), berpikir

kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi (Winataputra dan Budimansyah, 2007:192)

Uraian tersebut di atas, sangat sesuai dengan isi UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang memposisikan pendidikan karakter sebagai misi pertama dari delapan misi guna mewujudkan visi pembangunan nasional yang bertujuan untuk terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan warga negara Indonesia yang beragama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis dan berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lebih lanjut Kementerian Pendidikan Nasional dalam Disain Induk Pendidikan Karakter (2010:10) mengemukakan bahwa konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial kultural dapat dikelompokkan menjadi : Olah Hati (*spiritual and emotional development*) yang bertujuan menghasilkan sikap jujur dan bertanggung jawab, Olah Pikir (*intellectual development*) yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, Olah Raga dan Kinestetik (*physical and kinesthetic development*) yang bertujuan meningkatkan kualitas kebersihan dan kesehatan, dan Olah Rasa dan Karsa (*affective and creativity development*) yang bertujuan untuk meningkatkan sikap peduli dan kreatif. Perpaduan dari 4 (empat) aspek diatas akan menghasilkan nilai-nilai luhur dan perilaku berkarakter. Dengan kata lain, karakter dapat di maknai sebagai kualitas pribadi yang baik, dalam arti tahu kebaikan, mau berbuat baik dan nyata berperilaku baik, yang secara

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

koheren memancar sebagai hasil dari olah pikir, olah hati, olah raga, olah rasa dan karsa. Hal ini sesuai dengan pendapat Lickona (1991:51) yang mengemukakan bahwa karakter yang baik (*good characters*) terdiri atas proses psikologis *knowing the good, desiring the good, and doing the good – habit of the mind, habit of the heart, and habit of action*.

Namun, pada kenyataannya pembangunan karakter bangsa saat ini terindikasi memiliki banyak hambatan dan permasalahan. Dari berbagai faktor penyebab yang dapat memunculkan hambatan dan permasalahan tersebut, salah satu penyebabnya adalah penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan prinsip otonomi daerah yang sejatinya bertujuan untuk memandirikan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat, ternyata melahirkan bibit-bibit konflik yang disebabkan oleh berbagai faktor, dimana salah satu sumbernya adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan, dimana masih banyaknya pemerintah daerah yang menuntut diberikannya kewenangan yang masih dimiliki/dikuasai oleh pemerintah pusat seperti masalah pertahanan, keamanan dan agama, dengan alasan untuk kepentingan stabilitas wilayah.
2. Pendapatan Asli Daerah, dimana masih banyaknya perbedaan potensi yang dimiliki setiap pemerintah daerah sehingga sangat tergantung terhadap bantuan dari pemerintah pusat serta menjadikan kemandirian daerah yang semu. Besaran bantuan yang berbeda kepada setiap pemerintah daerah menjadikan salah satu sumber konflik antar daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dinikmati oleh daerah lain, misalnya kasus Gunung Tangkuban Perahu yang diperebutkan oleh Kabupaten Subang dengan Kabupaten Bandung.

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

3. Pengelolaan sumber daya alam, dimana banyak dieksplorasi dan dieksploitasi oleh pemerintah pusat namun persentase bagi hasilnya yang tidak menguntungkan daerah.
4. Konflik dalam partai politik secara internal dan eksternal yang pada umumnya bersumber menjelang dan setelah dilaksanakannya kegiatan pemilu Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah.
5. Etnisitas, dimana secara umum belum dihayati dan dilaksanakan oleh masyarakat sehingga tingkat toleransi dan adaptasi masih sangat rendah dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga menimbulkan konflik yang bernuansa suku, agama dan ras.

Sesungguhnya masih banyak ekspresi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat di era desentralisasi sekarang ini. Hal ini disebabkan pemerintah pusat terindikasi telah terfragmentasi dan buruknya melakukan koordinasi, selain itu pemerintah pusat terkesan tidak konsisten dengan kebijakan desentralisasi (otonomi daerah). Kesalahan urus yang parah dan kinerja pemerintah pusat yang buruk yang terjadi secara berkesinambungan telah memperpuruk legitimasi politik dan moral pemerintah pusat di hadapan masyarakat daerah. Terjadinya hal ini menyebabkan kebangsaan Indonesia ikut menanggung akibatnya.

Permasalahan di atas telah memperlihatkan bahwa hubungan antara integrasi nasional dengan otonomi daerah terkesan bertolak belakang. Sesungguhnya, dalam konteks integrasi nasional, otonomi daerah justru merupakan salah satu pilar utamanya.

Persoalannya adalah bagaimana otonomi daerah dapat diselenggarakan secara

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

proporsional sehingga secara bersamaan dapat dirasakan manfaatnya bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat landasan tetap kokohnya keutuhan bangsa dan negara.

Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat berpotensi mengganggu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta berindikasi akan memperlemah integrasi nasional, saat ini penyelenggaraan otonomi daerah secara bertahap mulai mengembangkan model pemerintahan yang berbasis masyarakat yang bertujuan selain untuk meningkatkan kualitas integrasi nasional juga untuk melibatkan warga negara secara aktif dalam berbagai bentuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan agar mereka mengetahui serta memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam kegiatan pemerintahan sehingga mereka semakin cerdas dan kritis terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Model pemerintahan yang melibatkan warga negara ini oleh peneliti disebut dengan *civic governance*.

Istilah *civic governance* merupakan istilah yang masih asing bagi telinga para aparatur negara maupun warga negara Indonesia. Berbagai literatur yang ada lebih banyak memfokuskan kepada *good governance* atau yang dikenal dengan tata pemerintahan yang baik dimana banyak menyorot kepada sisi sikap dan perilaku aparat dalam menyelenggarakan wewenangnya sebagai pelayan kepada warga negara. Selain itu terdapat berbagai literatur yang menjelaskan tentang *good government* atau pemerintahan yang baik dimana lebih menyorot kepada pelaksanaan lembaga atau institusi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Berkaitan dengan penyelenggaraan *civic governance* ini dapat dikatakan belum sepenuhnya menyentuh kepentingan serta melibatkan warga negara secara penuh. Dilibatkannya warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan secara langsung diindikasikan akan semakin meningkatkan kualitas pembangunan karakter bangsa yang sangat menjunjung tinggi kepada rasa memiliki terhadap bangsanya. *civic governance* pun secara langsung berindikasi akan meningkatkan sikap nasionalisme dan patriotisme di kalangan warga negara.

Dikembangkannya model *civic governance* yang berkaitan dengan konsep pembangunan partisipatif di Indonesia sehubungan saat ini proses pembangunan masih dilakukan secara konvensional dan bersifat sektoral serta terpusat (dari atas), selain itu serta kurang mengikut sertakan atau melibatkan potensi yang dimiliki masyarakat (dari bawah). Dalam model *civic governance* dan konsep pembangunan partisipatif, dicoba mendayagunakan semua potensi yang ada untuk mengembangkan/menumbuhkan pemecahan-pemecahan secara kreatif dalam pengelolaan pembangunan. Konsep ini mencoba untuk mencari keserasian antara pendekatan pengelolaan dari atas dan dari bawah berdasarkan keterlibatan semua pihak.

Walaupun pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang sangat positif, namun di dalam operasionalisasinya peneliti masih menemui berbagai permasalahan atau kendala di lapangan, diantaranya :

1. Pemerintah masih “setengah hati” dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.

2. Masih ditemuinya perbedaan persepsi/pendapat mengenai pemberdayaan masyarakat antara aparat pemerintah dengan LSM/organisasi komunitas.
3. Dalam kegiatan Musrenbang, pada umumnya peserta diundang oleh pihak pelaksana/pemerintah. Hal ini dari sisi demokrasi memiliki kelemahan mengingat keabsahan peserta sebagai representasi masyarakat masih diragukan.
4. Forum musrenbang atau sejenisnya seringkali bersifat formalitas.
5. Sumber Daya Manusia aparat pemerintah di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten pada umumnya masih memiliki kelemahan dalam penyusunan program kerja berbasis partisipatif.

Secara umum, permasalahan di tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi ataupun Pusat jauh lebih pelik dan kompleks. Permasalahan tersebut dapat dilihat pada aspek-aspek sebagai berikut :

1. Hubungan perencanaan daerah dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi maupun pusat/nasional cenderung kurang berkaitan satu sama lain.
2. Terdapat dualisme dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, karena struktur pemerintahan memunculkan dua lembaga yang berbeda antara perencanaan (Bapeda) dengan penganggaran (Panggar Eksekutif) yang dikoordinatori oleh Bagian Penyusunan Program atau Bagian Keuangan.
3. Seringkali panitia anggaran eksekutif ataupun legislatif tidak merujuk pada dokumen dan kebijaksanaan perencanaan dan penganggaran yang telah diproses sebelumnya melalui perencanaan partisipatif.

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

4. Banyak sektor tidak berpartisipasi dalam forum-forum perencanaan di tingkat daerah.
5. Informasi, monitoring dan evaluasi di tingkat komunitas tidak berjalan (tidak ada instrumen dan kemauan politik untuk menjalankan ini), dll.

Guna mengatasi berbagai permasalahan di atas, saat ini terdapat beberapa pemerintah daerah yang mulai mengembangkan konsep *civic governance*. Salah satu pemerintah daerah yang mulai mengembangkan model *civic governance* ini adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.

Model ini dikembangkan sehubungan di kalangan masyarakat Kabupaten Bandung sudah lama tertanam rasa kebersamaan yang sangat tebal, senasib sepenanggungan yang diwujudkan dalam gerak operasionalnya, yaitu: “*rempug jukung sabilulungan sauyunan di jiwaan ku sumanget satata jeung sariksa*” (melaksanakan kegiatan pembangunan yang didorong keinginan memenuhi kebutuhan bersama dengan cara dikerjakan bersama penuh pengertian dan serasi dijiwai semangat untuk memelihara karena disadari semua itu hasil kerja bersama). Sikap kebersamaan masyarakat tersebut sungguh sejalan dengan maksud dilaksanakannya *civic governance*.

Untuk menambah rasa kebersamaan “*rempug jukung sabilulungan sauyunan*” tersebut, perlu dikobarkan lagi dengan semangat *satata sariksa* dalam pelaksanaannya dengan model pengembangan *civic governance*. Dengan model ini, pelaksanaan pemerintahan dapat berhasil optimal karena memadukan aspek edukatif, aspek administrasi pembangunan, aspek pembinaan masyarakat (SDM), aspek

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

pembangunan perekonomian daerah dan aspek pengolahan sumber daya alam, dapat tertata dengan lebih baik.

Dilain pihak, model *civic governance* dimaksudkan untuk mengingatkan semua lapisan masyarakat Kabupaten Bandung, bahwa sejak dulu kita memiliki kebersamaan dalam membangun, yang harus dipelihara dan ditingkatkan, baik pada hari ini maupun untuk masa yang akan datang. Manusia dan masyarakat boleh berganti karena adanya regenerasi, tetapi hendaknya tetap mempunyai rasa kebersamaan “*rempug jukung sabilulungan sauyunan, satata jeung sariksa*”. Dengan demikian masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, yang diawali dengan musyawarah, kemudian diwujudkan. Dan setelah terwujud, dipelihara dengan semangat kebersamaan yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan kualitas nasionalisme serta mendukung integrasi nasional sebagai bagian dari tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan karakter bangsa.

Pemerintah Kabupaten Bandung melalui kegiataannya berusaha untuk melibatkan masyarakat walaupun belum menghasilkan kualitas yang diharapkan serta dirasakan hasilnya oleh masyarakat itu sendiri. Untuk itulah dalam Disertasi yang berjudul **PENGUATAN *CIVIC GOVERNANCE* MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi Eksploratif Di Kabupaten Bandung)**, peneliti akan mengeksplorasi dan menganalisis lebih mendalam untuk menemukan sebuah model yang tepat mengenai *civic governance*.

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Penelitian tentang penguatan *civic governance* dalam kerangka otonomi daerah sebagai landasan memperkuat integrasi nasional yang juga mengkaji tentang transformasi nilai-nilai pembangunan karakter bangsa serta kerangka model *civic governance* ini diperkokoh dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan urusan dan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah otonom, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta ketersediaan sumber daya aparturnya.

Selain itu, kegiatan penelitian terhadap pembangunan karakter bangsa melalui model *civic governance* ini, diharapkan akan dapat dilakukan rancang bangun ulang model pembinaan dan revisi landasan hukum yang berkaitan dengan pembangunan karakter bangsa melalui konsep *civic governance* di Kabupaten Bandung.

Patut disayangkan bahwa penelitian yang memfokuskan kepada konsep dan model *civic governance* masih sangat minim di Indonesia ini. Penelitian tentang *civic governance* seolah-olah sama dengan konsep *civil society* yang salah satu unsur utamanya dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dikenal dengan nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Walaupun kedua istilah tersebut memiliki pola yang sama sebagai sebuah "gerakan" (*movement*), tetapi sesungguhnya kedua istilah tersebut sangat jauh berbeda pada operasionalisasinya di lapangan dalam berpartisipasi pada proses penyelenggaraan pemerintahan.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian di atas dapat diindikasikan bahwa pembangunan karakter bangsa berbasis *civic governance* di Kabupaten Bandung masih memiliki sejumlah permasalahan. *Pertama*, belum konsistensinya masyarakat Kabupaten Bandung dalam memahami dan menghayati konsep *civic governance* dan pembangunan karakter bangsa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung guna menjadikan masyarakat memiliki kualitas nasionalisme yang baik. *Kedua*, secara substansial terdapat beragam persepsi tentang pembangunan karakter bangsa menurut kepentingan pihak-pihak tertentu. Adanya ragam persepsi ini diasumsikan karena belum adanya kesamaan persepsi masyarakat dalam menterjemahkan konsep *civic governance* secara positif. *Ketiga*, suatu kenyataan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung tengah berada dalam proses perubahan iklim demokrasi yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terjadinya perubahan ini karena secara politis, bangsa Indonesia tengah meninggalkan pasca politik Orde Baru dan tengah memasuki era baru yang dikenal dengan era reformasi yang memiliki iklim berbeda dari iklim politik sebelumnya. Indikator mendasar pada era ini adalah perubahan konstitusi dan sejumlah perangkat perundang-undangan, serta perubahan perilaku warga negara kearah demokratisasi dalam segala aspek kehidupan. Kenyataan ini pada gilirannya berdampak terhadap perlunya perubahan dalam sistem pembangunan ideologi dan politik.

Penulisan disertasi ini pada dasarnya ingin menjawab pertanyaan yang berfungsi sebagai rumusan masalah yang bersifat umum, yaitu bagaimana penguatan *civic governance* melalui partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

di Kabupaten Bandung. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa penguatan *civic governance* merupakan unsur strategis dalam upaya meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Berkaitan dengan identifikasi permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang khusus peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penguatan *Civic Governance* dalam kerangka Otonomi Daerah di Kabupaten Bandung ?
2. Bagaimana pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam memperkuat *Civic Governance* di Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa guna memperkokoh Integrasi Nasional di Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana pengembangan model konseptual baru dari *Civic Governance* untuk diterapkan di Kabupaten Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian Disertasi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan melalui kajian secara kritis, holistik dan kontekstual tentang penguatan *civic governance* dalam memperkokoh integrasi nasional. Penelitian inipun melakukan kajian terhadap pendapat, hakekat, pengetahuan, pengalaman, sikap, persepsi, dan gagasan responden sebagai subyek terfokus mengenai penguatan *civic governance* yang dikaitkan dengan pembangunan karakter bangsa. Penelitian ini bertujuan pula untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep *civic*

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

governance melalui proses kaji ulang teori yang telah ada serta penelitian empirik sebagai “calon” teori. Penelitian ini pun bertujuan menemukan perspektif baru tentang bagaimana seharusnya pendidikan kewarganegaraan dihubungkan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengeksplorasi dan menganalisis penguatan *civic governance* dalam kerangka otonomi daerah di Kabupaten Bandung.
2. Mengeksplorasi dan menganalisis pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam memperkuat *civic governance* di Kabupaten Bandung.
3. Mengeksplorasi dan menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembangunan karakter bangsa guna memperkokoh integrasi nasional di Kabupaten Bandung.
4. Mengeksplorasi, menganalisis dan mengembangkan model konseptual baru dari *civic governance* untuk diterapkan di Kabupaten Bandung .

D. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode studi eksploratif untuk menggali serta menjelaskan sifat dan kondisi suatu subyek dalam keadaan apa adanya. Pemilihan dan penggunaan desain ini terkait dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana penguatan *civic governance* melalui partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan serta mengembangkan model konseptual baru dari *civic governance*.

Melalui desain penelitian ini, selain menggunakan studi pustaka juga mengharuskan

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

peneliti melakukan wawancara dengan melihat dan mendengar informan berbicara yang sebenarnya tentang keadaan dan dirinya sesuai dengan perspektif masing-masing serta mengamati perilaku informan seadanya terhadap lingkungan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing. Guna memperoleh informasi dan data yang mendalam tentang fokus penelitian, maka peneliti dibantu dengan penyebaran angket kepada responden sehingga dapat dilakukan eksplorasi dan analisis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

Adapun lokasi penelitian ini selain dilakukan di Kantor Kesbanglinmas dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga dilaksanakan di 7 Kantor Kecamatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang terletak di Kecamatan Margahayu, Pangalengan, Rancaekek, Banjaran, Ciwidey, Majalaya, dan Cileunyi. Alasan pemilihan lokasi penelitian dijelaskan oleh peneliti pada Bab III.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis penguatan *civic governance* melalui partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan serta menghasilkan model *civic governance* yang dapat diterapkan di Kabupaten Bandung. Penelitian disertasi inipun memiliki kegunaan secara akademik atau bagi komunitas akademik, khususnya kontribusi terhadap pendidikan kewarganegaraan dalam rangka pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai disiplin ilmu yang mandiri.

2. Secara Praktis

Selain memiliki kegunaan akademik, penelitian disertasi inipun memiliki kegunaan secara praktis, yaitu berguna bagi :

- a. Para praktisi untuk pengembangan program kerja bidang pembangunan karakter bangsa di Kabupaten Bandung.
- b. Para aktivis masyarakat dan praktisi di berbagai lembaga yang berkaitan langsung dengan penguatan *civic governance*.
- c. Para pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakannya terutama yang terkait dengan program pembangunan karakter bangsa dan *civic governance* dalam upaya mempersiapkan warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart citizens*).

Selain itu, penelitian ini pun menghasilkan model yang dapat dimanfaatkan oleh para aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan negara yang berbasiskan kepada partisipasi masyarakat. Fakta yang dihasilkan dapat dimanfaatkan pula oleh pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap pentingnya pelaksanaan otonomi daerah dalam memperkokoh integrasi nasional.

F. Sistematika Disertasi

Struktur organisasi atau sistematika disertasi ini oleh peneliti di bagi kedalam lima Bab dan beberapa sub bab yang membahas berbagai permasalahan yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

Secara lengkap, struktur organisasi atau sistematika penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut :

Bab I (Pendahuluan)

Bab ini menguraikan enam sub bab yang terdiri atas Latar Belakang Penelitian, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, dan Sistematika Disertasi.

Bab II (Kajian Pustaka)

Pada Bab ini, peneliti memaparkan empat sub bab yang terdiri atas : pertama, *Civic Governance* yang terdiri dari konsep *civic governance*, pendidikan kewarganegaraan sebagai landasan konsep *civic governance* dan pembangunan karakter bangsa dalam konsep *civic governance*; kedua, Partisipasi Masyarakat yang terdiri atas peran partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara dan kebijakan pemerintah tentang partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan; ketiga, Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas konsep otonomi daerah, penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bandung, konsep *good government* dan konsep integrasi nasional; serta keempat, review penelitian terdahulu.

Bab III (Metode Penelitian)

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang telah dilakukan di lapangan dengan isi meliputi lokasi dan populasi/sampel penelitian, desain penelitian, metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, proses pengembangan instrument, teknik pengumpulan data, analisis data, dan jadwal penelitian.

Bab IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan)

Pada Bab ini memaparkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri atas penguatan *civic governance* dalam kerangka otonomi daerah, pelaksanaan partisipasi masyarakat

Rahman Mulyana, 2012

Peningkatan CINC Governance Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Eksploratif di Kabupaten Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

dalam memperkuat *civic governance*, peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembangunan karakter bangsa guna memperkokoh integrasi nasional, dan model *civic governance* di Kabupaten Bandung.

Bab V (Kesimpulan dan Saran)

Bab ini memaparkan Kesimpulan dan Saran dari penelitian Disertasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

